

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung;
- Amiri, K.2015. *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*;
- Azmi Fendri, 2016, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung;
- Bagir manan, *wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*;
- Bakri, M. (2011), *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*. Universitas Brawijaya Press;
- Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djamban, Jakarta;
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, J. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta;
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung;
- Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM : Jakarta;
- I Made Pase Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta;
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994);
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press;
- Julius Sembiring, 2016, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta;
- 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan;

_____ 2018, “Pengertian Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Negara”, Prenadamedia Group, Jakarta;

Kasperskaya, 2018, *Asset Management. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, Bandung;

Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta;

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta;

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;

Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Hukum Hak Milik Atas Tanah (suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis)*, Republika, Jakarta;

Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta;

Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*, Yogyakarta;

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya;

Ridwan HARI, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta;

Sarjita, 2005, *Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta;

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.

_____ , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Sugiono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta: Bandung.

Sumini, R. *Modul Pengelolaan Barang Milik Negara. Modul Pengelolaan Barang Milik Negara*, 2020.

B. Jurnal

Andrianto, F., *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 2020;

- Danel Aditia Situngkir, Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 5 No. 4, Juli 2023;
- Elfachri Budiman, Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistematis, dan Meluas di Indonesia, *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN*, Nomor 37 Tahun 12, April 2013;
- Kurniati, N., & Mordekhai, *Strengthening Land Registration System Through Implementation Of Domain Approach In Manifesting Legal Certainty And Community Justice*, *Sosiohumaniora*, 23(3), 2021;
- Limbong, D. Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya, *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 2017;
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya, Jakarta : Kompas, 2008;
- Mursil, M, Jaminan Kepastian Hukum Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha, Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 2014;
- Ningrum, H. R. S. Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 2014;
- Perdana, D. I., & Yuliana, Y. Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu Di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1), 2015;
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I, Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(1), 2022;
- Ramdany, R., & Setiawati, Y. Analisis Penatausahaan Aset Tetap Barang Milik Negara (Bmn). *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 310–323. 2021;
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 2, 2014;
- Sapto, Budoyo, Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4, No. 2, 2014;
- Sati, L., & Setyadi, S. Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha Dalam Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 1(2), 2022;
- Sinabutar, P., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., & Darusman, D. Kepastian hukum dan pengakuan para pihak hasil pengukuhan kawasan hutan negara di Provinsi Riau, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 2015;

Sumardi, T, Proses Peralihan Tanah Ulayat Menjadi Hak Guna Usaha Oleh PT. Mutiara Agam Kabupaten Agam, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4), 2020;

Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*, Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012;

Syugiarto, S., Karim, K. U., & Lembah, H. W. K. U. T. Sengketa Lahan Pembangunan Hunian Tetap Kota Palu, *Jurnal Administrator*, 3(1), 2021;

C. Tesis dan Disertasi

Anton Rosari, 2018 *Dekontruksi Pengaturan Pengelolaan Publik Tanah Yang dikuasai Oleh Negara Dalam Rangka Pembangunan Hukum Agraria Indonesia Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Disertasi Doktor Universitas Siwijaya, Palembang;

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2019

Hestia, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Minangkabau* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada), 2008;

Muhammad, A. S. *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram), 2021;

Rahmad, S. S. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Nonlitigasi* (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), 2014;

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2017;

Wati, H. R. *Peran Badan Pertanahan (BPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro), 2021.

E. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;*

Republik Indonesia *UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;*

Republik Indonesia *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat;

Pedoman Pemeriksaan Berkas Permohonan Hak Guna Usaha Nomor 4/JUKNIS-HT.01/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.